

Al-Ahkam
Jurnal Hukum Pidana Islam
Volume 6, No. 2, 2024
ISSN (print) : 2654-7937
ISSN (online) : 2715-0313
Homepage : http://journal.uiad.ac.id/index.php/al-ahkam/index

ABORSI YANG LEGAL BAGI KORBAN PEMERKOSAAN : PERLINDUNGAN HUKUM DAN PERDEBATAN HAM

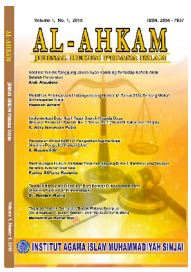
Inayatul Anisah[1], Ana Laela Fatikhatul Choiriyah[2], Tri Dharma Putra[3]
[1]University of Kiai Haji Achmad Siddiq, Jember
[2]Moch. Sroedji University, Jember
[3]University Jember
Korespondensi Penulis. E-mail: anisahinayah48@gmail.com

Abstrak

Korban pemerkosaan sering menghadapi dampak fisik, psikologis, seksual, dan ekonomi yang sangat berat, termasuk kehamilan yang tidak diinginkan, yang sering kali mendorong korban untuk melakukan aborsi. Meskipun Undang-Undang No. 39 Tahun 2009 tentang Kesehatan melarang aborsi, pengecualian diberikan kepada korban perkosaan dengan syarat adanya indikasi kedaruratan medis dan deteksi dini kehamilan. Namun, pelaksanaan aborsi bagi korban perkosaan masih dihadapkan pada penolakan sosial yang kuat, meskipun Pasal 49 ayat 3 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah menjamin hak perempuan atas perlindungan hukum terkait fungsi reproduksinya. Akan tetapi pada inkonsistensi antara perlindungan hukum yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan dan realitas sosial yang dihadapi oleh korban perkosaan saat mengakses layanan aborsi mengalami perbedaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perlindungan hukum bagi korban perkosaan yang memilih melakukan aborsi serta memahami faktor sosial yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan hak tersebut. Penelitian ini menggunakan metodologi yuridis normatif, dengan menganalisis regulasi yang mengatur aborsi dalam konteks pemerkosaan serta mengkaji literatur terkait praktik aborsi dan dinamika sosial di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat regulasi yang memberikan ruang bagi korban perkosaan untuk melakukan aborsi, implementasi di lapangan masih terhambat oleh tekanan sosial dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hak-hak reproduksi korban. Hal ini memperlihatkan adanya kebutuhan untuk memperkuat sosialisasi hukum dan pendekatan berbasis hak asasi manusia dalam menghadapi stigma aborsi pada korban perkosaan.
Kata Kunci: *Korban Perkosaan, Aborsi, Perlindungan Hukum*

Abstract

Rape victims often face severe physical, psychological, sexual, and economic impacts, including unwanted pregnancies, which often drive victims to have abortions. Although Law No. 39 of 2009 concerning Health prohibits abortion, exceptions are given to rape victims on the condition that there is an indication of a medical emergency and early detection of pregnancy. However, the implementation of abortion for rape victims is still faced with strong social rejection, even though Article 49 paragraph 3 of Law No. 39 of 1999 concerning Human



Al-Ahkam
Jurnal Hukum Pidana Islam
Volume 6, No. 2, 2024
ISSN (print) : 2654-7937
ISSN (online) : 2715-0313
Homepage : http://journal.uiad.ac.id/index.php/al-ahkam/index

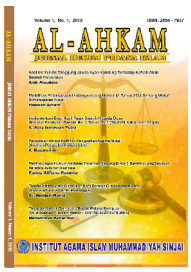
Rights has guaranteed women's rights to legal protection related to their reproductive functions. However, the inconsistency between the legal protection guaranteed by laws and regulations and the social reality faced by rape victims when accessing abortion services is different. The purpose of this study is to analyze legal protection for rape victims who choose to have abortions and to understand the social factors that become obstacles in the implementation of these rights. This study uses a normative legal methodology, by analyzing regulations governing abortion in the context of rape and reviewing literature related to abortion practices and social dynamics in society. The results of the study show that although there are regulations that provide space for rape victims to have abortions, implementation in the field is still hampered by social pressure and a lack of public understanding of the reproductive rights of victims. This shows the need to strengthen legal socialization and a human rights-based approach in dealing with the stigma of abortion in rape victims.

Keywords: *Rape Victims, Abortion, Legal Protection*

1. Pendahuluan

Aborsi pada wanita korban perkosaan ialah salah satu rumor penting dalam hukum pidana serta kesehatan reproduksi di Indonesia. Korban pemerkosaan kerap kali mengalami kehamilan yang tidak di idamkan, yang bisa memunculkan beban fisik, intelektual, serta sosial. Walaupun Undang- Undang No 36 Tahun 2009 mengenai Kesehatan sudah membagikan dispensasi untuk korban perkosaan guna melaksanakan pengguguran, faktanya, praktik pengguguran aman serta sah untuk korban pemerkosaan sedang mengalami bermacam hambatan, baik dari pandangan hukum, sosial, ataupun kedokteran (Angie, 2024).

Disaat ini, wanita korban pemerkosaan di Indonesia tengah susah mengakses aborsi yang nyaman serta sah. Bersumber pada informasi dari bermacam lembaga hak asasi manusia, stigma sosial serta perlawanan dari sarana kesehatan kepada korban perkosaan menimbulkan banyak wanita memilah pengguguran terlarang yang beresiko. Hambatan lain merupakan determinasi dalam Peraturan Pemerintah No 61 Tahun 2014 yang mewajibkan pengguguran dilakukan dalam durasi sangat lama 40 hari semenjak kehamilan, yang kerap kali tidak cocok dengan kenyataan korban yang telanjur mengetahui kehamilannya. Sedikitnya akses kepada layanan kesehatan reproduksi

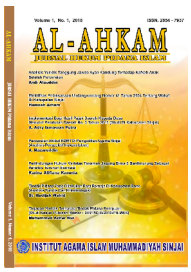

Al-Ahkam
Jurnal Hukum Pidana Islam
Volume 6, No. 2, 2024
ISSN (print) : 2654-7937
ISSN (online) : 2715-0313
Homepage : http://journal.uiad.ac.id/index.php/al-ahkam/index

untuk korban perkosaan menggambarkan terdapatnya kesenjangan antara regulasi serta penerapan di lapangan (Perempuan, 2019).

Dalam kesusastraan, bermacam riset sudah mangulas hak- hak reproduksi wanita korban kekerasan seksual. Artikel- artikel semacam yang diterbitkan oleh LSM internasional serta akademisi hukum memerhatikan jika pengguguran ialah wujud proteksi hak asasi orang untuk korban pemerkosaan. Di sebagian negeri, hak ini dipastikan dengan lebih jelas lewat metode hukum yang gampang diakses. Sedangkan itu, di Indonesia, hambatan hukum serta sosial jadi tantangan penting. Penelitian-penelitian sebelumnya mengarah berpusat pada pandangan moral serta etis aborsi, tetapi masih sedikit yang mengangkut permasalahan aksesibilitas serta proteksi hukum untuk korban perkosaan dengan cara menyeluruh (Widowati, 2023).

Riset ini bermaksud guna menganalisa lebih dalam kebijaksanaan hukum terkait pengguguran untuk korban perkosaan di Indonesia. Riset ini hendak mempelajari gimana kebijaksanaan yang terdapat bisa membagikan proteksi yang mencukupi untuk wanita korban pemerkosaan, dan menelaah hambatan- hambatan yang dirasakan dalam mengakses layanan pengguguran yang nyaman serta legal. Tidak hanya itu, riset ini juga hendak mangulas keterkaitan hukum terpaut hak hidup janin dan bagaimana negara bisa menghasilkan penyeimbang antara perlindungan hak reproduksi wanita serta hak hidup janin.

Bersumber pada perihal itu, dalam kondisi proteksi hak wanita korban perkosaan, ada kesenjangan antara pemikiran akhlak keimanan, kebijaksanaan hukum, serta implementasinya di lapangan. Fatwa Majelis Ulama Indonesia(MUI) membagikan kelonggaran untuk korban perkosaan guna melaksanakan pengguguran dengan ketentuan khusus, semacam kehamilan yang masih dalam tahap awal serta terdapatnya bahaya guncangan psikologis. Tetapi, ketentuan ini kerap kali tidak berintegrasi dengan cara maksimal dengan kebijaksanaan hukum positif, serupa yang diatur dalam No 36 Tahun 2009 mengenai Kesehatan serta Peraturan Pemerintah No 61 Tahun 2014


Al-Ahkam
Jurnal Hukum Pidana Islam
Volume 6, No. 2, 2024
ISSN (print) : 2654-7937
ISSN (online) : 2715-0313
Homepage : http://journal.uiad.ac.id/index.php/al-ahkam/index

mengenai Kesehatan Reproduksi, yang meminta ketatnya masa penerapan pengguguran serta kebijakan kedokteran yang kompleks. Situasi ini menghasilkan kesenjangan dalam akses perempuan korban perkosaan kepada hak- hak reproduksi mereka yang dilindungi secara agama serta hukum. Oleh sebab itu, dibutuhkan kesepadanan yang lebih bagus antara ajaran MUI serta peraturan perundang- undangan, untuk menjamin hak- hak wanita korban perkosaan atas proteksi hukum yang komprehensif serta seimbang, baik dari bagian hak reproduksi ataupun perlindungan dari dampak psikologis serta sosial.

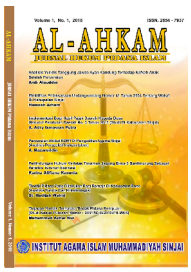
2. Metode

Berisi Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitianhukum normatif dan dikaji dengan menggunakan jenis pendekatan undang-undang.Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer seperti halnya peraturan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi dan bahan hukum sekunder seperti Buku-buku hukum, artikel jurnal, dan penelitian sebelumnya yang relevan dengan isu aborsi, hak perempuan, dan perlindungan hukum.Metode pendekatan yuridis yang digunakan adalah pendekatan yuridis Adapun penulisan menggunakan pendekatan undang-undangundang (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Teknik analisis kualitatif deskriptif untuk mengeksplorasi data dan informasi yang diperoleh, serta mengidentifikasi pola dan tema yang relevan dalam konteks perlindungan hak perempuan korban perkosaan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Aborsi dalam Hukum Positif di Indonesia

Wanita adalah makhluk yang lemah, tidak mampu menjaga diri dan harga dirinya. Bahkan wanita adalah makhluk yang rentan untuk diperkosa. Sementara laki-laki tidak rentan untuk memperkosa dan di sisi lain wanita tidak mungkin untuk memperkosa. Berbagai kejahatan seksual dapat dilakukan oleh laki-laki terhadap



Al-Ahkam
Jurnal Hukum Pidana Islam
Volume 6, No. 2, 2024
ISSN (print) : 2654-7937
ISSN (online) : 2715-0313
Homepage : http://journal.uiad.ac.id/index.php/al-ahkam/index

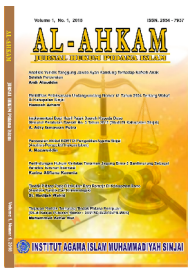
wanita, artinya wanita tidak dapat memaksanya untuk berhubungan seks dengan laki-laki yang tidak terdeteksi. Kemampuan untuk bertindak bagi laki-laki hanya ada pada kondisi primer (Maloko, 2024). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) melarang keras dilakukannya aborsi dengan alasan apapun, sebagaimana diatur dalam pasal 283, 299 serta pasal 346 – 349. Bahkan pasal 299 intinya mengancam hukuman pidana penjara maksimal empat tahun kepada seseorang yang memberi harapan kepada seorang perempuan bahwa kandungannya dapat digugurkan.

Tindakan medis dalam bentuk pengguguran kandungan dengan alasan apapun dilarang karena bertentangan dengan norma hukum, norma agama, norma kesusilaan, dan norma kesopanan. Namun aturan KUHP yang keras tersebut telah dilunakkan dengan memberikan peluang dilakukannya aborsi. Sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang No.36 tahun 2009 tentang kesehatan. sehingga dalam keadaan darurat sebagai upaya menyelamatkan jiwa ibu dan atau janin yang dikandungnya dapat diambil tindakan medis tertentu. Aborsi dalam Undang-Undang No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 75 menyatakan : 1). Setiap orang dilarang melakukan aborsi 2). Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:

1) Indikasi kedaruratan media yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau

2) Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.

3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan “diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.

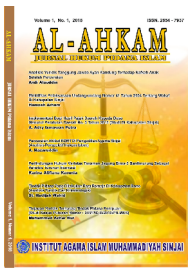


Al-Ahkam
Jurnal Hukum Pidana Islam
Volume 6, No. 2, 2024
ISSN (print) : 2654-7937
ISSN (online) : 2715-0313
Homepage : http://journal.uiad.ac.id/index.php/al-ahkam/index

4) Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ddiatur dengan Peraturan Pemerintah.

Konselor dalam ketentuan ini adalah setiap orang yang telah memiliki sertifikat sebagai konselor melalui pendidikan dan pelatihan. Yang dapat menjadi konselor adalah dokter, psikolog, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan setiap orang yang mempunyai minat dan memiliki keterampilan untuk itu. Menghadapi situasi seperti ini, tenaga medis tetap harus berusaha menyadari tugasnya untuk mengedepankan kehidupan. Perempuan yang mengalami kesulitan itu perlu dibantu dengan melihat jalan keluar lain yang tidak langsung melakukan pengguguran. Tenaga medis hanya berani menolak pengguguran langsung dengan indikasi sosial-ekonomi.

Undang- Undang No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 75 butir ke-2 dan 3 menunjukan para ahli kesehatan dan ahli hukum dapat memahami alasan aborsi karena merupakan hal-hal yang di luar kemampuan korban, dimana pada butir ke 2, apabila bayi dibiarkan hidup, mungkin akan menjadi beban keluarga serta kurang baiknya masa depan anak itu sendiri. Namun keadaan ini bertentangan dengan UU HAM pasal 53 mengenai hak hidup anak dari mulai janin sampai dilahirkan, dan pasal 54 mengenai hak untuk mendapatkan perawatan, pendidikan, pelatihan dan bantuan khusus atas biaya negara bagi setiap anak yang cacat fisik dan mental. Pada butir ke 3, kemungkinan besar bayi tidak akan mendapatkan kasih sayang yang layak, bahkan mungkin akan diterlantarkan ataupun dibuang, yang bertentangan dengan UU Kesehatan pasal 4 tentang perlindungan anak mengenai hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Sedangkan bagi ibu yang merupakan korban pemerkosaan itu sendiri, hal ini merupakan keputusan yang kurang adil apabila kehamilan akibat perkosaan itu dilanjutkan, karena dia sendiri adalah korban suatu kejahatan, dan pasti akan merupakan suatu beban psikologis yang berat.



Al-Ahkam
Jurnal Hukum Pidana Islam
Volume 6, No. 2, 2024
ISSN (print) : 2654-7937
ISSN (online) : 2715-0313
Homepage : http://journal.uiad.ac.id/index.php/al-ahkam/index

Dalam melaksanakan ketentuan peraturan mengenai aborsi di dalam UU Kesehatan, pemerintah menerbitkan PP Kesehatan Reproduksi. Ketentuan legalitas aborsi terhadap kehamilan Pasal 31 ayat (1) dan (2) PP Kesehatan Reproduksi, mengatur bahwa tindakan aborsi hanya dapat dilakukan apabila usia kehamilan paling lama berusia 40 hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir. Ketentuan Pasal 34 ayat (2) PP Kesehatan Reproduksi mengatur bahwa kehamilan akibat perkosaan harus dibuktikan dengan:

a) Usia kehamilan sesuai dengan kejadian perkosaan, yang dinyatakan oleh surat keterangan dokter,

b) Keterangan penyidik, psikologi, dan/atau ahli lain mengenai adanya dugaan perkosaan.

Adapun yang dimaksud dengan "ahli lain" berdasarkan penjelasan Pasal 34 ayat (2) huruf b PP Kesehatan Reproduksi antara lain dokter spesialis psikiater, dokter spesialis forensic, dan pekerjaan social (Irfan, 2011).

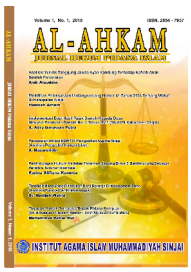
Adapun pelaksanaan tindakan aborsi harus melakukan wajib lapor kepada dinas kesehatan kabupaten atau kota sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 39 PP Kesehatan Reproduksi sebagai berikut:

1.Setiap pelaksanaan aborsi wajib dilaporkan kepada dinas kesehatan kabupaten/kota dengan tembusan kepala dinas kesehatan provinsi.

2.Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan.

3.2. Hak Untuk Hidup Bagi Janin Korban Pemerkosaan yang Melakukan Aborsi

Secara yuridis jelas bahwa HAM terkait dengan sesuatu yang mendasar dalam kehidupan manusia. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng. Oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau



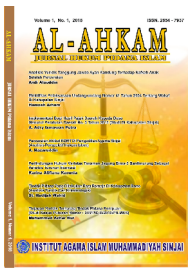
Al-Ahkam
Jurnal Hukum Pidana Islam
Volume 6, No. 2, 2024
ISSN (print) : 2654-7937
ISSN (online) : 2715-0313
Homepage : http://journal.uiad.ac.id/index.php/al-ahkam/index

dirampas oleh siapapun. Hak asasi menggambarkan sesuatu yang melekat dalam diri manusia, baik akibat hukum Negara maupun ketentuan dari Tuhan (Askandar, 2012).

UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM mengatur tentang hak-hak yaitu hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita, dan hak anak. Mengenai hak untuk hidup, Pasal 9 (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, mengatur bahwa setiap orang berhak untuk hidup, dan mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.

Ketentuan ini menunjukkan bahwa hak untuk hidup merupakan hak mendasar yang melekat atau dimiliki seseorang sebagai karunia Tuhan. Selanjutnya pada pasal 53 (1) Undang-Undang Hak Asasi Manusia mengatur tentang hak anak. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa setiap anak dalam kandungan berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya. Sejalan dengan Undang-Undang HAM, maka Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mengatur tentang perlindungan anak. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat, martabat kemanusiaan (Muladi, 2009).

Kewajiban memberikan perlindungan bagi anak merupakan kewajiban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak. Undang-undang perlindungan anak bahkan telah memberikan sanksi pidana bagi mereka yang tidak menjalankan ketentuan undang-undang tentang perlindungan anak. Berdasarkan kedua pasal dalam Undang-Undang HAM tentang hak hidup bagi setiap orang bahkan anak dalam kandungan mengandung makna larangan melakukan pembunuhan. Apalagi orang tua

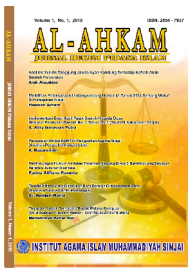

Al-Ahkam
Jurnal Hukum Pidana Islam
Volume 6, No. 2, 2024
ISSN (print) : 2654-7937
ISSN (online) : 2715-0313
Homepage : http://journal.uiad.ac.id/index.php/al-ahkam/index

sebagai orang yang sangat bertanggung jawab untuk memelihara dan melindungi anak dari segala sesuatu yang dapat merusak masa depannya (Firdawaty, 2017).

Masalahnya menjadi berbeda apabila kehamilan tersebut benar-benar mengancam hidup sang ibu. Dalam kasus ini, aborsi bisa dibenarkan berdasarkan prinsip *legitime defense* (pembelaan diri yang sah) (Wijaya, 2021). Dimana seseorang berhak untuk membela diri terhadap serangan orang lain yang jelas mengancam hidupnya. Perlu digarisbawahi dalam kasus kehamilan yang berbahaya membunuh janin di dalam kandungan bukanlah menjadi tujuan perbuatan tersebut. Tujuan perbuatan tersebut adalah menyelamatkan hidup ibu dan kematian janin hanyalah efek dari perbuatan dari menyelamatkan nyawa sang ibu. Masih dalam garis yang sama, bisa dikatakan bahwa kehamilan yang membahayakan hidup sang ibu, dan dihadapkan pada persaingan antara dua pesona yang sama-sama bernilai, tetapi pada jalan yang buntu. Pada prinsipnya, bila dapat diselamatkan kedua-duanya dapat diselamatkan maka tidak akan ditempuh jalur aborsi dan hak hidup janin tetap akan dipertahankan.

Terkait kasus aborsi perlu diketahui bersama bahwa Negara Indonesia merupakan Negara *civil law system,* sebelum masuk terhadap kebolehan aborsi yang dilakukan karena kasus pemerkosaan, penulis ingin menggambarkan Negara *civil law system* dan Negara *common law system* yang memperbolehkan aborsi, adapun Negara tersebut diantaranya Amerika Serikat dan Belanda, hukum aborsi AS yang menganut *common law system* maupun hukum aborsi Belanda yang menganut *civil law system* mengalami perkembangan yang serupa, yaitu telah berubah dari hukum aborsi yang bersifat restriktif menjadi liberal. Dikatakan demikian, karena pada mulanya baik hukum aborsi AS maupun hukum aborsi Belanda menganut model larangan *(model of prohibition)* dan kemudian berubah menjadi sangat liberal dan menganut model privasi *(model of privacy* (Soge, 2009).

Di Indonesia, sejak diberlakukannya KUHP yang diadopsi dari KUHP Belanda 1881 berdasarkan UU No. 1 Tahun 1946, ketentuan hukum tentang aborsi menganut



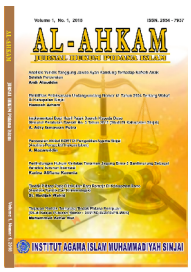
Al-Ahkam
Jurnal Hukum Pidana Islam
Volume 6, No. 2, 2024
ISSN (print) : 2654-7937
ISSN (online) : 2715-0313
Homepage : http://journal.uiad.ac.id/index.php/al-ahkam/index

model larangan *(model of prohibition)* karena aborsi dilarang tanpa pengecualian sebagaimana diatur di dalam Pasal 346 s.d. 349 KUHP yang merupakan turunan dari Pasal 295 s.d. 298 KUHP Belanda 1881. Kemudian model larangan yang dianut di dalam KUHP ini disempurnakan dengan adanya pengecualian setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan meskipun terdapat pengecualian didalamnya.

Oleh karena itu hukum pidana yang berkaitan dengan aborsi atau *ius constitutum* tentang aborsi di Indonesia tergolong hukum yang paling konservatif dan keras terhadap aborsi karena melarang aborsi kecuali untuk menyelamatkan jiwa ibu. Namun setelah *International Conference on Population and Development (ICPD)* Kairo 1994 dan *Fourth World Conference on Women* (FWCW) Beijing 1995, dirancang RUU Amandemen UUK yang mengacu pada kesepakatan ICPD Kairo 1994 tentang hak reproduksi perempuan dan secara implisit melegalkan aborsi karena membolehkan aborsi aman, bermutu dan bertanggung jawab untuk menghindarkan perempuan yang mengalami KTD dari praktek aborsi tidak aman yang sering merenggut jiwa perempuan.

Kasus anak hamil diluar perkawinan di Indonesia semakin hari semakin meningkat sebagaimana Data Kemensos per 6 Januari 2022, jumlah anak hamil akibat kekerasan seksual yang telah ditangani oleh Kemensos sebanyak 780 anak dengan rincian, 568 orang sudah melahirkan dan 212 belum melahirkan (Makdori, 2022), selain itu terdapat kasus ditahun sebelumnya pada tahun 2021 yaitu kasus pemerkosaan terhadap anak keterbelakangan mental, Warga Desa Subur Indah Kecamatan Katingan Kuala ini merupakan gadis yang mengalami keterbelakangan mental. Diketahui hamil lima bulan, diluar nikah. Diduga kuat merupakan korban pemerkosaan (Metropholis, 2021).

Sebagai penutup, penting untuk menegaskan bahwa hak asasi manusia, terutama hak hidup, merupakan pilar fundamental dalam perlindungan hukum, baik bagi


Al-Ahkam
Jurnal Hukum Pidana Islam
Volume 6, No. 2, 2024
ISSN (print) : 2654-7937
ISSN (online) : 2715-0313
Homepage : http://journal.uiad.ac.id/index.php/al-ahkam/index

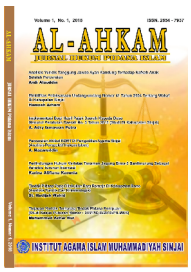
individu maupun anak dalam kandungan. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta peraturan terkait lainnya menegaskan komitmen Negara dalam melindungi hak-hak ini, meskipun tantangan dalam implementasinya, terutama dalam kasus aborsi akibat perkosaan, masih sangat kompleks. Di Indonesia, meskipun terdapat pengecualian dalam peraturan mengenai aborsi, sistem hukum yang cenderung konservatif masih menyulitkan akses perempuan terhadap layanan aborsi yang aman dan legal. Oleh karena itu, dibutuhkan reformasi hukum yang lebih progresif dan responsif untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi perempuan korban kekerasan seksual, serta untuk memastikan hak-hak mereka diakui dan dihormati dalam kerangka hukum yang ada. Upaya ini seharusnya mencerminkan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang universal dan tidak boleh mengabaikan keberadaan dan kesejahteraan janin, yang juga merupakan bagian dari hak untuk hidup.

3.3. Terkait Status Anak Lahir di Luar Perkawinan dan Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2005 tentang Aborsi

Ahli Hukum Islam memakai sebagian sebutan guna memberitahukan tindakan pengguguran, semacam sebutan isqat, ijhad, ilqa, serta inzal. Istilah- istilah itu memiliki penafsiran yang serupa ialah aborsi janin dari kandungan saat sebelum menggapai kesempurnaanya (Rufaida, 2020). Mengenai status anak lahir di luar perkawinan dan apabila seorang ibu hamil yang disebabkan pemerkosaan, MUI mengeluarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Aborsi dengan penjelasan sebagaimana berikut.

Aborsi dibolehkan karena ada uzur, baik bersifat darurat ataupun hajat (Octavian, 2023).

a. Keadaan darurat yang berkaitan dengan kehamilan yang membolehkan aborsi adalah:



Al-Ahkam
Jurnal Hukum Pidana Islam
Volume 6, No. 2, 2024
ISSN (print) : 2654-7937
ISSN (online) : 2715-0313
Homepage : http://journal.uiad.ac.id/index.php/al-ahkam/index

1.Perempuan hamil menderita sakit fisik berat seperti kanker stadium lanjut, TBC dengan caverna dan penyakitpenyakit fisik berat lainnya yang harus ditetapkan oleh tim dokter.

2.Dalam keadaan di mana kehamilan mengancam nyawa si ibu.

b.Keadaan hajat yang berkaitan dengan kehamilan yang dapat membolehkan aborsi adalah:

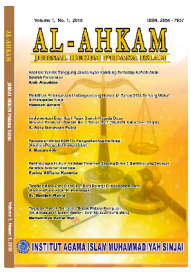
1. Janin yang dikandung dideteksi menderita cacat genetik yang kalau lahir kelak sulit disembuhkan.

2. Kehamilan akibat perkosaan yang ditetapkan oleh tim yang berwenang yang di dalamnya terdapat antara lain keluarga korban, dokter, dan ulama.

c. Kebolehan aborsi sebagaimana dimaksud huruf b harus dilakukan sebelum janin berusia 40 hari.

Adapun mashlahah dalam Fatwa MUI tersebut membolehkan aborsi sebelum janin dalam kandungan belum memiliki ruh, pertimbangannya karena dalam kondisi ini lebih didahului *hifzun nafs* dan *hifzul- aql* (jiwa ibu) lebih diutamakan dari pada *hifzul-nasl*. Mengenai kebolehan aborsi juga di jelaskan didalam RUU KUHP dimana pasal aturan tentang aborsi diatur dalam pasal 467, 468 dan 469, Pada pasal 467 disebutkan, perempuan yang melakukan aborsi terancam dipidana penjara empat tahun. Namun, ancaman pidana itu tidak berlaku bagi mereka yang menjadi korban perkosaan dengan angka kehamilan tidak lebih dari 12 minggu.

Dengan demikian setelah penulis jelaskan terkait kebolehan aborsi , maka kewajiban negara yang seyogyanya untuk melindungi *(to protect)* warganya demi kepastian hukum Pasal 75 ayat (2) huruf b UU Kesehatan perlu ditinjau kembali,selain bertentangan dengan kode etik kedokteran kasus aborsi juga dapat menghilangkan nyawa seseorang apabila tidak dilakukan secara professional, sedangkan yang terjadi kasus pemerkosaan dan anak hamil diluar nikah semakin hari semakin tinggi, sehingga

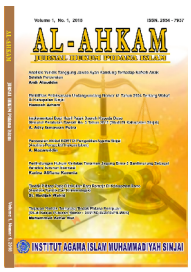

Al-Ahkam
Jurnal Hukum Pidana Islam
Volume 6, No. 2, 2024
ISSN (print) : 2654-7937
ISSN (online) : 2715-0313
Homepage : http://journal.uiad.ac.id/index.php/al-ahkam/index

kasus tersebut menjadikan hilangnya masa depan seorang perempuan dan perempuan menanggung malu akan kasus tersebut.

4. Simpulan

Aborsi terhadap kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan, aborsi yang dilakukan oleh korban perkosaan hanya dapat dilakukan apabila telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Pasal 75 ayat (3) dan Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Kehamilan akibat perkosaan adalah melanggar hak-hakreproduksi korban perkosaan, oleh karenanya ada pengecualian aborsi bagi korban perkosaan bertujuan untuk memberikan jaminan dan perlindungan hukum terhadap hak-hak reproduksi korban perkosaan sebagai perwujudan hak asasi manusia.

Pengaturan aborsi dalam Pasal 75 ayat (2) huruf b UU Kesehatan yang memberikan legitimasi tindakan aborsi akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan, hal ini bertentangan dengan hak hidup janin yang berada dalam kandungan. Bahwa kepentingan korban perkosaan tidak dapat lebih diutamakan ketimbang kepentingan janin (hak untuk hidup) dan Jika alasan aborsi hanya sebatas untuk memenuhi hak dan kebebasan ibu dari beban psikis dan social serta kebebasan hidupnya sebagai makhluk yang mempunyai HAM. Berdasarkan penjelasan mengenai kebolehan aborsi dalam konteks pemerkosaan dan kondisi darurat menurut Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2005, serta ketentuan yang terdapat dalam RUU KUHP, jelas bahwa aborsi diperbolehkan dalam situasi tertentu untuk melindungi jiwa dan kesehatan ibu serta mempertimbangkan kondisi janin. Kewajiban negara untuk melindungi warganya, terutama perempuan yang menjadi korban pemerkosaan, harus diimbangi dengan ketentuan hukum yang mendukung hak-hak mereka. Mengingat tingginya angka kehamilan akibat pemerkosaan dan stigma yang dihadapi perempuan hamil di luar nikah, perlu adanya revisi terhadap Pasal 75 ayat (2) huruf b UU Kesehatan untuk memastikan perlindungan yang lebih komprehensif dan sesuai dengan



Al-Ahkam
Jurnal Hukum Pidana Islam
Volume 6, No. 2, 2024
ISSN (print) : 2654-7937
ISSN (online) : 2715-0313
Homepage : http://journal.uiad.ac.id/index.php/al-ahkam/index

kode etik kedokteran. Hal ini penting agar perempuan mendapatkan keadilan dan tidak kehilangan masa depan mereka akibat situasi yang tidak diinginkan.

Daftar Pustaka

Angie, V. (2024). Kriminalisasi Terhadap Perempuan Pelaku Aborsi Melalui Teori Feminisme. *Jurnal Unes Law Review, Vol. 6, No. 4, Juni* , 11342.

Askandar, N. C. (2012). Hak Untuk Hidup' dalam Kajian Islam dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal An-Natiq, Universitas Islam Malang*, 54.

Firdawaty, L. (2017). Aborsi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam (Analisis terhadap Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi). *AL-'ADALAH Vol. 14, Nomor 1*, 119.

Haniru, R., & Salam, S. (2023). HAK-HAK TERPIDANA DALAM HUKUM JINAYAH. *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam*, *5*(2), 76-89.

Irfan, A. W. (2011). *Perlindungan Korban Kekerasan Seksual.* PT. Refika Aditama .

Iriani, D., & Budiono, A. (2020). INTERGARASI FILSAFAT PANCASILA DAN BINEKATUNGGAL IKA DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN KRIMINALITAS PELAJAR DAN MAHASISWA. *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies*, *2*(2), 268-287.

Maharani, A., & Nur, M. A. (2023). Urgensi Visum ET Repertum Pada Tahap Penyidikan Dalam Mengungkap Tindak Pidana Penganiayaan. *Indonesian Journal of Criminal Law*, *5*(1), 1-8.

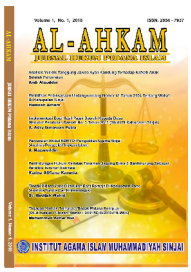
Makdori, Y. (2022). *Laporan Kemensos Sebut 780 Anak Hamil Akibat Kekerasan Sekual.* https://www.liputan6.com/news/read/4904618/laporan-kemensos-sebut-780-anak-hamil-akibat-kekerasan-sekual diakses.

Maloko, M. T. (2024). PERLINDUNGAN HAK ASASI PEREMPUAN DALAM HUKUM ISLAM PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DALAM HUKUM ISLAM. *Al-Ahkam Hukum Pidana Islam* , 55.

Metropholis. (2021). *Gadis Berkebutuhan Khusus Hamisl DIluar Nikah.* https://kaltengonline.com/2021/05/22/gadis-berkebutuhan-khusus-hamil-di-luar-nikah/3/.

Muladi. (2009). *Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat.* PT. Rafika Aditama.

Octavian, R. (2023). Analisis Hukum Aborsi menurut Fatwa MUI dan PP Nomor 61 Tahun 2014. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam, Volume 3, No. 1, Juli*, 37.



Al-Ahkam
Jurnal Hukum Pidana Islam
Volume 6, No. 2, 2024
ISSN (print) : 2654-7937
ISSN (online) : 2715-0313
Homepage : http://journal.uiad.ac.id/index.php/al-ahkam/index

Perempuan, K. (2019). *Hak Atas Kesehatan Dan Hak Atas Pangan Perempuan.* Penerbit: Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) , Cetakan I, Oktober.

Rellang, A. (2024). PENGGUNAAN PRINSIP HAK ASASI MANUSIA UNTUK MENYELESAIKAN KONFLIK AGAMA DI INDONESIA: PANDANGAN HUKUM NASIONAL DAN ISLAM. *AL-AHKAMJurnal Hukum Pidana Islam*, 33.

Rufaida, R. (2020). Resiko Keselamatan Bagi Ibu Hamil Sebagai Alasan Melakukan Aborsi Perspektif Hukum Islam. *Ekonomi Syariah & Hukum Islam*, 3.

Soge, P. (2009). Legalisasi Aborsi di Indonesia Perspektif Perbandingan Hukum Pidana: Antara Common Law System dan Civil Law System. *JURNAL HUKUM NO. 4 VOL. 16 OKTOBER* , 509.

Tahir, M. (2021). TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB PENGURUS CREDIT UNION DALAM RAPAT ANGGOTA TAHUNAN. *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam*, *3*(1), 53-66.

WAHID, S. H. (2018). Tindak Pidana Yang Dilakukan Para Remaja Di Kabupaten Bone (Analisis Yuridis Dann Kriminologis). *AL-AHKAM*, *1*(1).

Widowati. (2023). Tindakan Aborsi Dalam Sudut Pandang Hukum Dan Kesehatan Di Indonesia. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung*, 18.

Wijaya, I. G. (2021). 'Hukuman Mati dan Euthanasia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Peraturan Perundang-Undangan' . *Jurnal Kertha Negara*, 97-98.